



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2023





TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,





- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya penataan SKPD berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan kebutuhan mendesak dalam rangka mendanai program kegiatan pada beberapa SKPD serta berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/568/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

| KARO HUKUM | KABAN | ASISTEN | Pj.SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

| | | | |
|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN | ASISTEN | Pj. SEKDA |
|  |  |  |  |

16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 06);
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49), diubah sebagai berikut:





1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp491.989.218.495,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp491.989.218.495,00
2. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp1.337.018.578.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.337.018.578.000,00

| KARO HUKUM | KABAN | ASISTEN | Pj. SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp3.289.180.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp3.289.180.000,00 |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.832.296.976.495,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.397.041.304.439,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 25.388.088.663,00</u> |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp1.422.429.393.102,00 |

2. Belanja Modal
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp218.803.281.733,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 4.626.525.337,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp223.429.807.070,00 |





3. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp37.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp30.014.614.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 6.985.386.000,00 |

4. Belanja Transfer
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp201.211.603.252,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp201.211.603.252,00 |

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.854.056.189.424,00
Surplus/(Defisit) Rp(21.759.212.929,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp56.601.497.652,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan | Rp56.601.497.652,00 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN | ASISTEN | Pj.SEKDA |
|  |  |  |  |

setelah perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp34.842.284.723,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp34.842.284.723,00 |

Jumlah Pembiayaan Netto Rp21.759.212.929,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
Pada tanggal 17 Maret 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,







HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada Tanggal 17 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 5

| KARO HUKUM | KABAN | ASISTEN | Pj. SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 491.989.218.495 | 491.989.218.495 | 0 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 429.888.172.626 | 429.888.172.626 | 0 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 7.185.681.722 | 7.185.681.722 | 0 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.456.586.737 | 5.456.586.737 | 0 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 49.458.777.410 | 49.458.777.410 | 0 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.337.018.578.000 | 1.337.018.578.000 | 0 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.337.018.578.000 | 1.337.018.578.000 | 0 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 3.289.180.000 | 3.289.180.000 | 0 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.289.180.000 | 1.289.180.000 | 0 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.832.296.976.495 | 1.832.296.976.495 | 0 |
| 5 | BELANJA | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.397.041.304.439 | 1.422.429.393.102 | 25.388.088.663 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 684.344.820.456 | 689.909.820.456 | 5.565.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 597.838.120.038 | 617.161.208.701 | 19.323.088.663 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 2.533.516.850 | 2.533.516.850 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 90.698.097.095 | 91.198.097.095 | 500.000.000 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 21.626.750.000 | 21.626.750.000 | 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 218.803.281.733 | 223.429.807.070 | 4.626.525.337 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 5.412.931.000 | 5.412.931.000 | 0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 47.451.556.159 | 49.286.292.859 | 1.834.736.700 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 42.318.403.826 | 43.018.403.826 | 700.000.000 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 116.259.684.277 | 118.301.472.914 | 2.041.788.637 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.240.706.471 | 7.290.706.471 | 50.000.000 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 37.000.000.000 | 6.985.386.000 | (30.014.614.000) |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 37.000.000.000 | 6.985.386.000 | (30.014.614.000) |

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 201.211.603.252 | 201.211.603.252 | 0 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 200.886.603.252 | 200.886.603.252 | 0 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| | Jumlah Belanja | 1.854.056.189.424 | 1.854.056.189.424 | 0 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (21.759.212.929) | (21.759.212.929) | 0 |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 56.601.497.652 | 56.601.497.652 | 0 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 56.601.497.652 | 56.601.497.652 | 0 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 56.601.497.652 | 56.601.497.652 | 0 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 34.842.284.723 | 34.842.284.723 | 0 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 29.842.284.723 | 29.842.284.723 | 0 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 34.842.284.723 | 34.842.284.723 | 0 |
| | Pembiayaan Netto | 21.759.212.929 | 21.759.212.929 | 0 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL APBD | 1.888.898.474.147 | 1.888.898.474.147 | 0 |

Pj. GUBERNUR GORONTALO

HAMKA HENDRA NOER